

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI MUSRENBANGDES SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRATISASI DI TINGKAT DESA

Kamaruddin¹, Afina Aurelly Kamal^{2*}, Putri Kusma Adekayanti³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: afinaaurellyakamal@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 09 Desember 2024 Accepted: 21 Desember 2024 Published: 31 Desember 2024	<i>This study aims to know the implementation of participatory development plan at the Village development plan deliberation, in Lape village Lape Sub-District in 2023. The type of this study was qualitative study. Sources of data in this study were primary and secondary data. The numbers of informants in this study were 11 informants consisted of Head village of Lape, Village Secretary of Lape Village, head of Village Consultative Board of Lape Village and Lape Village Communities. The methods used to collect data were through observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study was carried out using Miles and Huberman's qualitative data analysis techniques which consist of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study showed that communities' involvement in the development process in Lape Village was quite good so that the developments that had planned by apparatus of Lape Village have been done in accordance with the needs of the Lape Village communities. Therefore the success of a participatory development cannot be separated from the participation of the communities where communities' participation were the most important and most important factor in the development and implementation process so that a successful development plan can be realized in Lape Village.</i>
Keywords Development Planning; Community Participation; Democratization.	

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan secara sadar oleh suatu negara untuk mencapai sebuah keadaan dan situasi yang lebih baik dari sebelumnya, dengan terencana dan terarah guna pembinaan pada bangsa. Negara Indonesia, saat ini, tengah semarak dalam pelaksanaan pembangunan yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini dalam mendukung tujuan Bangsa Indonesia yang dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, maka dibentuk kebijakan nasional dimana menyangkut adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang merupakan peluang kepada seluruh pemerintah daerah khususnya kabupaten kota untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi, kemampuan, karakteristik masing masing daerah yang bersangkutan.

Pembangunan yang terarah pelaksanaannya memerlukan sebuah perencanaan yang mampu mewujudkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan dimana perencanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh berbagai pihak penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat ataupun daerah. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan sangatlah penting, yang dapat memberikan manfaat besar, di antaranya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan pembangunan, serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal (Setiawan *et al.*, 2020).

Untuk merealisasikan suatu tujuan pembangunan dan meminimalisir resiko kegagalan pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis dengan tetap melakukan prediksi dan pertimbangan terkait perubahan kondisi dan situasi pada tahun pelaksanaan dan masa yang akan datang. Proses pembangunan dapat terencana dengan baik sangat ditunjang oleh peran aktif masyarakat maupun unsur masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Sebagai wujud implementasi sistem demokrasi di daerah perlu dilaksanakan konsistensi dan keberlanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat (Dahliah, 2022).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu issue strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabel dan adil. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. Penyampaian aspirasi dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musrenbang menjadi wadah bagi berbagai pihak masyarakat untuk terlibat dalam sistem perencanaan dan anggaran pada pelaksanaan pembangunan. Musrenbang merupakan suatu agenda rutin tahunan dimulai yang diselenggarakan menyesuaikan tingkatan dan levelnya masing-masing, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional (Ikmal *et al.*, 2021).

Musrenbang diartikan sebagai pelaksanaan forum musyawarah oleh para pemangku kepentingan yang berjalan secara partisipatif dan sifatnya tahunan sebagai kesepakatan rencana kegiatan tahun anggaran yang diselenggarakan menyesuaikan tingkatan dan levelnya masing-masing. Musrenbang dilakukan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan karena pembangunan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang melainkan untuk kepentingan publik. Musrenbang ini mempunyai tujuan sebagai penetapan dan penampung kegiatan prioritas menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat yang didapat dari musyawarah perencanaan sejalan dengan tingkat dibawahnya. Artinya, pendekatan perencanaan pembangunan akan sesuai harapan pemerintah dan seluruh masyarakat di daerah tersebut dengan mengkombinasikan pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*. (Purwaningsih, 2022).

Berhasil atau tidaknya pembangunan menyesuaikan bagaimana proses perencanaan dilaksanakan, mengingat keberhasilan pembangunan bukanlah atas dasar hebat tidaknya pembangunan yang direncanakan, tetapi bagaimana kesesuaian pembangunan itu dengan kebutuhan masyarakat tidak sekedar mengacu pada kepentingannya pemerintah. Oleh sebab itu, pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif sangat diperlukan. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan cara dalam pencapaian pembangunan yang diharapkan masyarakat. Dimana semua stakeholder bersama-sama menentukan program pembangunan yang diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Widianingsih, 2020).

Partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program, tingginya partisipasi masyarakat maka program atau kebijakan akan mendekati keberhasilan dan sasaran program dapat menjangkau seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah menjadi prioritas utama dalam kegiatan musyawarah desa karena masyarakat yang menjadi subjek pembangunan artinya masyarakat akan terlibat langsung serta merasakan dari kebijakan dan kegiatan pembangunan (Hadawiya *et al.*, 2021).

Musrenbang Desa yang belum mengikutsertakan semua elemen secara menyeluruh untuk membuat prioritas kegiatan padahal dalam rangka membangun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, serta berdaya agar tercipta partisipasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan sebab masyarakat merupakan pihak yang paling tahu masalah yang terjadi serta kebutuhan yang diinginkan, dengan demikian partisipasi masyarakat mampu mengakomodasi kepentingannya untuk proses penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan ini mempunyai tujuan sebagai perwujudan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, sebagai langkah meraih keberhasilan dan mewujudkan pembangunan ini, diperlukan perhatian terhadap banyak aspek termasuk partisipasi masyarakat pada pembangunan khususnya ketika tahapan perencanaan sebagai tahapan terpenting ketika proses pembangunan, sebab perencanaan ini mampu menjadi penentu berhasil tidaknya sebuah pembangunan (Far, 2022).

Desa Lape merupakan salah satu pedesaan yang ada di wilayah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi NTB yang dimana Desa Lape ini merupakan Desa terbesar dari empat Desa yang ada di Kecamatan Lape dan Desa Lape terdiri dari enam Dusun, dengan Luas Wilayah sekitar 32.27.000 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.816 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.494 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3.322 jiwa, jumlah total penduduk di Desa Lape yaitu 6.816 jiwa.

Setiap daerah memerlukan suatu perubahan seperti infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari seperti tempat ibadah (Masjid), gang-gang jalan, selokan dan lain-lain. Untuk menentukan apa saja yang akan dibangun maka diperlukannya perencanaan musyawarah desa bersama pemerintah dan melibatkan masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Lape Kecamatan Lape. Dengan demikian, pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat melahirkan sebuah keputusan yang mengakomodir kepentingan umum.

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Lape adalah bentuk partisipasi masyarakat daerah tersebut, dengan demikian pembangunan yang akan dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat kelak tanpa adanya suatu keterpaksaan. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan ide, gagasan dan usulan. Sehingga mendapat kesepakatan untuk menentukan prioritas dalam melakukan pembangunan desa sehingga terwujud pemerataan pembangunan di Desa Lape Kecamatan Lape.

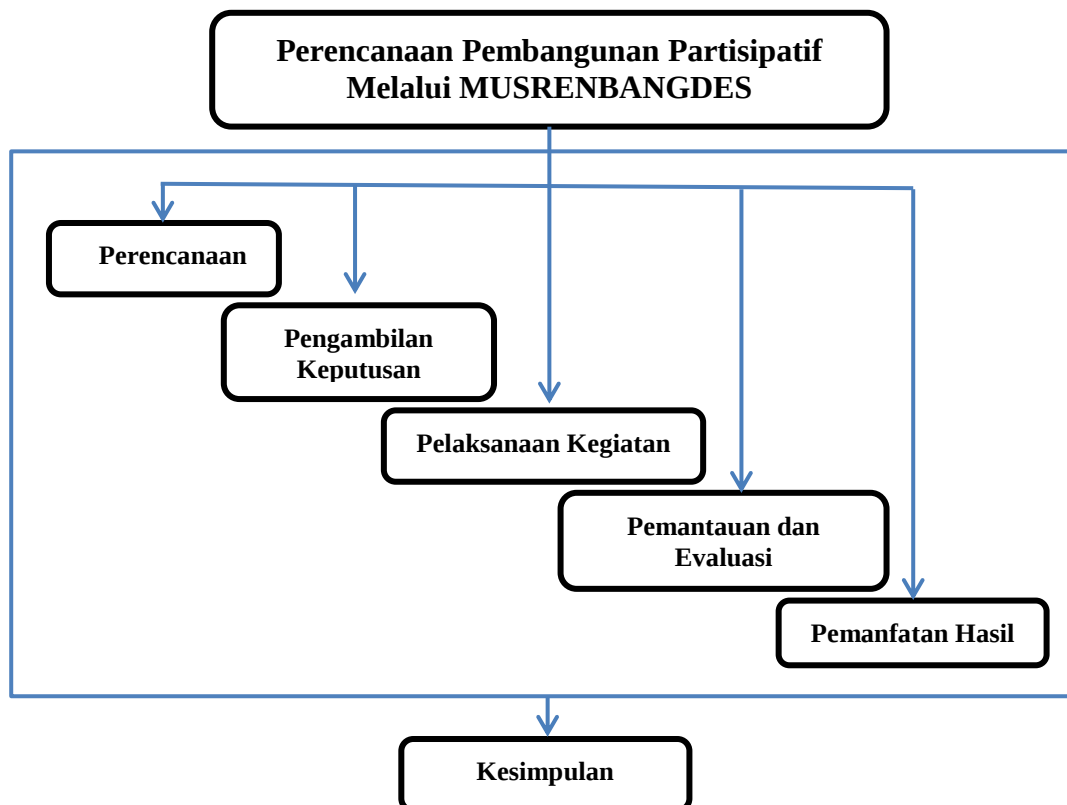
Namun permasalahan yang sering muncul dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat masih rendah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang hanya sekitar 40 persen, dan yang hadir hanya pejabat *grass root*, yaitu ketua RT dan RW dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan juga masih sebatas formalitas dan dihadiri oleh masyarakat yang sama setiap tahunnya serta beberapa perwakilan masyarakat yang hadir hanya lebih banyak mendengarkan tanpa memberi ide atau mengutarakan dengan menceritakan kebutuhan apa yang mereka hendaki.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Sebagai Perwujudan Demokratisasi di Tingkat Desa**. Berkaitan dengan masalah yang ada tersebut, maka penelitian ini mengarah pada mekanisme Musrenbangdes sebagai upaya penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga program-program pembangunan desa yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif. Rukajat (2021) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada terkait Implementasi perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan demokratisasi ditingkat desa. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka desain alur dan kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini merupakan persepsi informan penelitian yang disampaikan secara tertulis mengenai Implementasi perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan demokratisasi ditingkat desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Arikunto (2019), data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan penelitian menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Meleong (2021), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria subjek yang akan dijadikan sebagai informasi penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan pada penelitian ini terdiri atas informan kunci dan informan utama.

1. Informan Kunci

Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang dijadikan informan kunci pada penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun Lape Atas, dan Kepala Dusun Lape Bawah.

2. Informan Utama

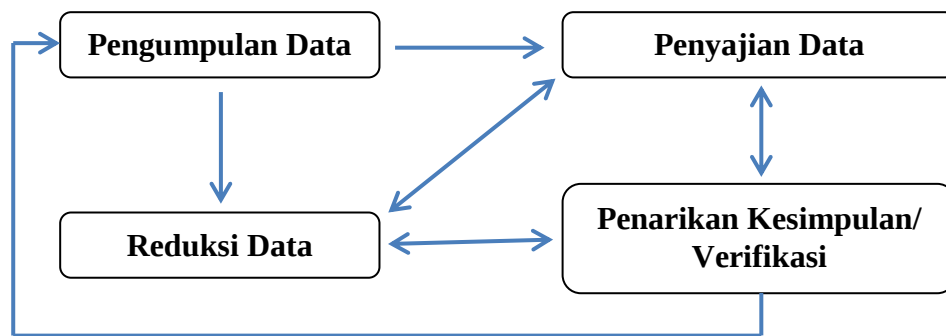
Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Adapun pihak yang akan dijadikan informan utama pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Lape yang berjumlah 5 orang dan dipilih secara acak.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikaji dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode wawancara terstruktur. Menurut Kriyantono (2021), wawancara terstruktur adalah percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan tertulis secara berurutan dalam pedoman wawancara untuk kemudian diajukan kepada nara sumber. Adapun materi yang disusun dalam pedoman wawancara ini berhubungan dengan Implementasi perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan demokratisasi ditingkat desa.

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Muliaan *et al.*, 2024), berpendapat bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Kegiatan analisis data terdiri reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Proses Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Kegiatan pembangunan desa atau masyarakat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa memiliki makna membangun manusia seutuhnya dan diarahkan dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pembangunan. Hal tersebut merupakan langkah kongkrit dalam upaya pembangunan desa menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrenbangdes sebagai perwujudan demokratisasi di tingkat desa telah implementasi dengan baik di Desa Lape. Tujuan utama seorang perencana dalam melakukan perencanaan adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan mereka. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Lape adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Joni Ardiansyah A.Md. selaku Kades Lape yang mengatakan sebagai berikut:

“Semua masyarakat sudah kami libatkan dalam proses perencanaan pembangunan kami undang bagi siapa saja yang mau datang agar kami aparat Desa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Muslimin Salam selaku masyarakat Lape Bawah sebagai berikut mengatakan bahwa:

“Sejauh ini masyarakat dilibatkan dalam setiap perencanaan pembangunan guna untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah dilibatkan oleh pemerintah Desa Lape dalam tahap perencanaan pembangunan guna untuk menyampaikan apa saja yang menjadi harapan masyarakat selama ini. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan di Desa Lape dapat dilakukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Joni Ardiansyah A.Md selaku Kades Desa Lape sebagai berikut mengatakan bahwa:

“Iya, setiap kami akan mengambil suatu keputusan kami selalu meminta pendapat masyarakat”.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Umar Dani selaku masyarakat Dusun Lape atas sebagai berikut mengatakan bahwa:

“Kami hanya ikut saat rapat saja, tapi keputusan hasil rapat diputuskan oleh pemerintah Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aparat Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat rapat perencanaan pembangunan saja. tetapi untuk pengambilan keputusan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat desa lainnya dengan mempertimbangkan saran dari masyarakat.

3. Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan bapak Syafruddin selaku Sekretaris Desa Lape menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa, seperti pengerjaan jalan dan pengerjaan draenase”.

Hasil wawancara diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hamsia selaku masyarakat Dusun Lape Bawah yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat selalu diajak saat pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa seperti gotong royong pembangunan jalan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu ikut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa seperti pembangunan jalan, dan draenase.

4. Melibatkan Masyarakat Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sebagai diperlukan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Syafaruddin selaku ketua BPD Desa Lape sebagai berikut:

“Tentu saja masyarakat boleh menilai pembangunan yang telah dilaksanakan mengenai baik atau buruk dan sesuai atau tidak sesuai karena itu merupakan fungsi dari masyarakat”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Syamsuddin selaku masyarakat Dusun Unter Malang yaitu:

“Kami dapat menilai pembangunan yang telah dilakukan, tetapi kita sebagai masyarakat tidak dapat menyampaikan kritik dan saran karena pemerintah sudah pasti tidak akan menanggapi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menilai pembangunan yang telah dilakukan, meskipun masyarakat tidak bisa menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah karena pemerintah tidak akan menanggapi.

5. Masyarakat Ikut Serta Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesekurelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sukri Mahmud selaku Kadus Lape Atas, yaitu:

“Seluruh masyarakat di bebaskan untuk menikmati hasil pembangunan tanpa melihat perbedaan yang kaya maupun yang miskin”.

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Rahmawati selaku masyarakat Dusun Karato yang menyatakan bahwa:

“Kami masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada dengan sepenuhnya, karena pemerintah Desa memberikan kami kebebasan dalam menikmati semua hasil pembangunan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh sarana dan prasarana pembangunan desa ditujukan untuk seluruh masyarakat, tanpa diskriminatif. Seluruh fasilitas tersebut dapat dipergunakan oleh semua kalangan, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi masyarakat.

Pembahasan

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan (Manghayu, 2018).

Penelitian ini mengulas tentang perubahan paradigma dalam implementasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif melalui musrenbang dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Lape sudah cukup baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh aparat Desa Lape dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Lape. Maka dari itu keberhasilan suatu pembangunan partisipatif tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat merupakan faktor yang paling utama dan yang paling penting dalam proses pembangunan dan pelaksanaan sehingga dapat terwujudnya suatu keberhasilan dari perencanaan pembangunan yang ada di Desa Lape. Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat dalam Musrenbangdes sangat berpengaruh, semakin banyak masyarakat yang menghadiri rapat, maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dapat terwujud dengan baik.

Kesadaran dan partisipasi yang aktif dari masyarakat Desa Lape sendiri merupakan suatu keberhasilan dalam pembangunan tersebut, karena pencapaian target program pembangunan perlu ditujukan pada kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sehubungan dengan ini dapat kita kaitkan bahwa pembangunan partisipatif juga dapat ditentukan oleh besar kecilnya partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan partisipatif ini tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau pun masyarakat saja. Tetapi hal ini merupakan suatu kegiatan bersama yang mana hasilnya dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk Desa maupun seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan yang ada di Desa Lape, merupakan suatu cerminan keberhasilan dari pembangunan nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putra Pratama Saputra *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Melalui partisipasi masyarakat akan menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam membuat rencana pembangunan desa, pemerintah desa menerapkan proses perencanaan *bottom up* yang digunakan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan program prioritas daerah dan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Lape sudah cukup baik dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Lape. Dengan demikian, pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh aparat Desa Lape sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Lape. Maka dari itu, keberhasilan suatu pembangunan partisipatif tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat merupakan faktor yang paling utama dan yang paling penting dalam proses pembangunan dan pelaksanaan sehingga dapat terwujudnya suatu keberhasilan dari perencanaan pembangunan yang ada di Desa Lape.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Lape adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
2. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa
3. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa
4. Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan desa
5. Masyarakat ikut serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan desa.

SARAN

Dalam rangka optimalisasi model pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa, maka saran yang dapat penulis diajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah desa kiranya dapat menampung semua usulan melalui program-program masyarakat khususnya dalam hal usulan perencanaan pembangunan partisipatif agar partisipasi yang diajukan masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi. Kedepannya, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar perencanaan pembangunan kedepannya dapat terlaksana dengan baik sehingga implementasi perencanaan pembangunan partisipatif pada musrenbangdes di Desa Lape berjalan dengan baik.

2. Bagi Masyarakat

Diperlukannya kesadaran masyarakat bahwa partisipasi dalam suatu musyawarah lebih ditingkatkan dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan pembangunan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dahliah. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten Majene. *YUME: Journal of Management*, 5(3): 774-795.
- Far, R.A.F. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Sebagai Sistem Komunikasi Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 11(1): 57-76.

- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B.M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2): 192-200.
- Ikmal, N.M., Prawesti, B.A., Dimas Ayu, D.R., & Fajry, M. (2021). Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1): 40-52.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2): 95-115.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliaan, B.Z.N., Pandowo, M.H.C., & Mintardjo, C.M.O. (2024). Evaluasi Penerapan Reward Terhadap Peningkatan Kerja Karyawan di Rumah Makan Tepi Pantai. *Jurnal EMBA*, 12(1): 145-150.
- Purwaningsih, M.R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1): 151-164.
- Rukajat, A. (2021). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Cet. Pertama)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, P.P., Aisyah, S., & Darmanto. (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Pemekaran Sebagai Perwujudan Demokratisasi Ditingkat Lokal (Suatu Studi Pada Desa Pemekaran di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Jurnal Wacana Politik*, 6(1): 74-83.
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 3(2): 251-270.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widianingsih, I. (2022). Kajian Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif Berbasis Gender. *Bappeda: Journal of Research*, 1(1): 1-20.